



Yogyakarta Siap Luncurkan 'Whistleblower System'

YOGYAKARTA — Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera meluncurkan instrumen baru untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berencana menerapkan "whistleblower system" untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mencegah praktik korupsi.

"Harapannya, sistem ini bisa diluncurkan pada Desember atau saat peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember," kata Inspektur Pembantu Bidang Pe-

ngawasan Pembangunan Fisik Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta Fitri Paulina, di sela sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Yogyakarta, Selasa (25/11).

Menurut Fitri, Inspektorat Pemkot Yogyakarta terus mematangkan instrumen pencegahan korupsi tersebut. Mulai dari sistem informasi pelaporannya, termasuk pemberian perlindungan terhadap pelapor dan tindak lanjut penanganan laporan. Selama ini, ia mengatakan, pemkot sudah memiliki Unit Pelayanan In-

formasi dan Keluhan (UPIK) yang menampung berbagai keluhan dan pengaduan dari masyarakat umum. Namun dengan adanya "whistleblower system", ia mengatakan, pegawai di lingkungan pemerintah pun dapat memanfaatkannya.

Biasanya, Fitri mengatakan, pegawai di lingkungan pemda akan merasa takut untuk menyampaikan laporan apabila menemui kejanggalaan atau penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. "Harapannya, de-

ngan adanya 'whistleblower system' akan semakin memudahkan pegawai untuk menyampaikan laporan tanpa rasa khawatir," ujar dia.

Menurut Fitri, Inspektorat Pemkot Yogyakarta memang pernah menerima laporan dari pegawai pemerintah mengenai dugaan penyimpangan. Namun, ia mengatakan, laporan itu datang dari pegawai yang tidak memiliki kepentingan. Menurut dia, pegawai dengan kondisi itu memang lebih berani untuk melapor. Untuk itulah, Inspektorat kemudian

meluncurkan sistem baru, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelapor lainnya.

Jika instrumen pencegahan korupsi tersebut diluncurkan, Fitri mengatakan, maka Yogyakarta akan menjadi pemerintah daerah tingkat dua yang paling awal memiliki "whistleblower system". Selama ini, menurut dia, instrumen tersebut baru berjalan di tingkat kementerian.

Sementara itu, Inspektur Pemkot Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan, upaya

menciptakan pemerintahan yang bersih terus dilakukan. Salah satunya dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang gratifikasi. "Gratifikasi biasanya dalam bentuk parcel makanan. Semuanya pun sudah disalurkan ke badan-badan sosial. Laporan penyaluran gratifikasi juga sudah dinyatakan *clear* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata dia.

Untuk yang sulit disalurkan, Wahyu mengatakan, rencananya akan dilakukan lelang. ■ antara ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005